



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SEKOLAH DASAR (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)

Winarsih, Y. Warella, Hartuti Purnaweni

ABSTRACT

This research is qualitative research on the implementation of primary school teacher certification in Semarang district.

There are misinformations about work period requisite, portofolio and lesson plan format. In resources factor, staff, information and authority subfactor are going along effectively. However, facilities subfactor is not sufficient. Facilities including building, equipments and supplies, budgetary allocation are not available. Disposition implementor factor tends to be good. Bureaucracy structure supports the implementation well. Finally, social economy environment are also supporting factors in implementation of teacher certification for basic education in Semarang district.

Keywords : *implementation, teacher certification, primary school*

A. PENDAHULUAN

Kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen memang suatu langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang

telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Terlepas dari berbagai permasalahan seputar implementasi kebijakan sertifikasi guru ini, pada hakekatnya implementasi kebijakan ini harus dilakukan

Alamat Korespondensi :
MAP Undip
Telp : 024-8452791
Email : mapdialogue@yahoo.com

dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas, prioritas yang jelas serta sumber daya pendukung yang jelas pula. Program sertifikasi tidak hanya dipandang sebagai cara memberikan tunjangan profesi, tetapi sebagai upaya mengubah motivasi dan kinerja guru secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Kondisi guru SD di Kabupaten Semarang menarik dan layak untuk diteliti karena jumlah guru SD yang sudah berijazah S-1 lebih dari **30%** (sekitar 1.105 guru) dari keseluruhan jumlah guru berijazah S-1 di Kabupaten Semarang (lihat tabel I.2). Jumlah 30% ini sangat jauh dibandingkan dengan persentase nasional jumlah guru SD berkualifikasi S-1 dari keseluruhan guru berijazah S-1 Indonesia yaitu **13,6%** (sekitar 130.898 guru). Hal menarik lain adalah kuota guru SD di Kabupaten Semarang yang mendapat sertifikat guru juga cukup besar dibandingkan guru SMP dan SMA. Wilayah Kabupaten Semarang yang luas yaitu 981,95 km² yang terdiri dari 19 kecamatan dan jumlah guru SD yang besar yaitu 5.029 orang menyebabkan sosialisasi sertifikasi guru SD di Kabupaten

Semarang tidak mudah. Selain itu, tidak ada pos anggaran khusus dari pusat dalam sosialisasi sertifikasi di Kabupaten Semarang. Sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang terkait dengan minimnya dana dalam pelaksanaan sertifikasi guru SD. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor komunikasi dalam implementasi sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi implementor, struktur birokrasi, lingkungan sosial ekonomi dalam implementasi sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang.

George Edward III (1980) membahas empat faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variable-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi. Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Sumber-sumber yang

penting meliputi; staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Faktor yang keempat adalah struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak, memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern (Budi Winarno, 2002 : 125). Senada dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edwards III,

menurut Van Meter dan Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumberdaya, (3) komunikasi antar organisasi, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik dan (6) disposisi (Subarsono, 2005 : 99).

Dari dua model implementasi diatas maka dapat disimpulkan ada lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi implementor, struktur birokrasi dan lingkungan eksternal yaitu lingkungan sosial dan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Rancangan penelitian ini menggunakan studi kasus, yaitu bertujuan untuk memahami secara menyeluruh mengenai implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar di Kabupaten Semarang. Fokus penelitian ini mengungkap implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar di Kabupaten Semarang dengan mengadakan kajian secara mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut yaitu

komunikasi, sumberdaya, lingkungan eksternal, struktur birokrasi dan kecenderungan/disposisi implementor. Hal-hal yang diamati adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu komunikasi, sumberdaya, lingkungan eksternal, struktur birokrasi dan kecenderungan/disposisi implementor. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu data verbal yang merupakan informasi responden tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi adalah wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dengan fokus penelitian yang akan diteliti. (Faisal, 1990). Informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini :

1. Tim Sertifikasi Guru Universitas Negeri Semarang

2. Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang
3. Para Guru SD di Kabupaten Semarang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat bantu, yaitu : Pedoman wawancara, Pedoman *Focused Group Discussion*, dan alat perekam. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Interactive Model Analysis* dari Miles dan Huberman, meliputi tiga tahap, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

B. PEMBAHASAN

Dalam proses implementasi kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaannya adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi implementor, struktur birokrasi dan lingkungan eksternal yaitu lingkungan sosial ekonomi.

1. Komunikasi

Edwards dalam Budi Winarno (2002 : 126) membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Pertama, transmisi dalam komunikasi sertifikasi

kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang ini terkait dengan penyampaian informasi, frekuensi pelaksanaan sosialisasi dan penggunaan media yang beragam. Sebelum para pelaksana dapat mengimplementasikan suatu kebijakan maka mereka telah memperoleh informasi yang cukup untuk pelaksanaannya. Dengan tersedianya buku pedoman pelaksanaan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, maka penyampaian informasi bisa berjalan baik. Penyampaian informasi cukup baik ditandai dengan adanya *sharing* informasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang kepada UPTD Kecamatan ataupun langsung kepada guru, sebagaimana yang diungkapkan salah satu peserta FGD,

“Kami dikumpulkan oleh UPTD Kecamatan tentang daftar nama guru yang masuk daftar peserta sertifikasi tahun 2008 ini, kemudian sedikit-sedikit kami disuruh mengkaji dari senior yang sudah lulus. Kemudian kami mengikuti sosialisasi dari dinas untuk menerima penjelasan penyusunan portofolio”. (FGD tanggal 14 Juni 2008)

Terkait permasalahan dana dalam sosialisasi maka sarana dan prasarana dalam penyampaian informasi juga sangat tergantung kondisi di lapangan. Hal ini diakui oleh Kasi Mutasi Tenaga Pendidik (Mutendik) Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Drs. Acyadi Yusri,

“Jujur saja, untuk masalah sarana dalam penyampaian informasi kami sangat tergantung kondisi di lapangan. Karena memang kami tidak ada dana khusus untuk pelaksanaan sertifikasi ini. Kalau pas ada jadwal pelaksanaan sosialisasi, kami koordinasi di lapangan untuk mempersiapkan tempat, LCD dan komputer.” (Wawancara tanggal 12 Juni 2008).

Selanjutnya, konsistensi dalam komunikasi sertifikasi guru SD juga baik. Dengan memakai acuan buku pedoman maka para pelaksana mampu menjaga kekonsistenan informasi dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kejelasan merupakan aspek yang menjadi permasalahan dalam komunikasi informasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang. Permasalahan ini antara lain mengenai persyaratan masa kerja guru,

format portofolio dan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini disebabkan sebagian besar pelaksana adalah staf struktural dinas pendidikan memiliki keterbatasan pengetahuan tentang konsep portofolio dan teknis penyusunannya.

2. Sumberdaya

Van Meter dan Horn dalam Subarsono (2005: 100) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*).

Faktor ini meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Komponen yang pertama adalah staf. Sumber daya dalam pelaksanaan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang dari sisi staf memiliki kemampuan yang cukup baik namun jumlahnya masih kurang memadai. Menurut pendapat Edwards dalam Budi Winarno (2002: 132), staf merupakan sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Namun, jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Sejalan dengan hal itu, meskipun dari segi jumlah pelaksana sertifikasi guru SD di Kabupaten

Semarang tidak terlalu banyak namun dengan bekal kemampuan yang dimiliki maka mereka mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tingkat pendidikan para pelaksana sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang cukup baik yaitu minimal SMA. Dari 13 orang staf, 7 orang berlatar belakang pendidikan S1 dan 2 orang berpendidikan S2 yaitu Kasi Mutasi Tenaga Pendidik dan Kepala Bidang Tenaga Pendidik. Tingkat pendidikan ini juga dibarengi dengan tingkat keterampilan yang cukup karena separuh lebih sudah terampil mengoperasikan komputer. Dengan berbekal pengalaman dari waktu ke waktu maka pelaksana sertifikasi Kabupaten Semarang mampu menyelesaikan tugas dengan semakin baik. Hal ini diakui oleh Kasi Mutasi Tenaga Pendidik (Mutendik) Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Drs. Acyadi Yusri, "Kemampuan pelaksana rata-rata baik. Namun memang yang bisa mengakses atau menggunakan komputer baru sebagian. Namun tidak menjadi kendala karena pekerjaan yang tidak menggunakan komputer misal verifikasi datakan juga banyak." (Wawancara tanggal 12 Juni 2008)

Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam hal implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru. Informasi sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang ini sudah cukup memadai namun dibutuhkan keaktifan guru untuk mengakses informasi tersebut. Namun yang menjadi kendala dalam penyediaan informasi ini adalah pihak dinas hanya menyediakan masternya dan para guru harus menggandakan sendiri. Hal ini disebabkan tidak ada dana khusus dalam pelaksanaan sertifikasi di Kabupaten Semarang. Hal ini ditegaskan oleh Kasi Mutasi Tenaga Pendidik (Mutendik) Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Drs. Acyadi Yusri,

"Dari sosialisasi tingkat propinsi kami hanya mendapat 5 set buku pedoman. Kami hanya memfotokopikan 1 per UPTD Kecamatan. Kami memang tidak ada anggaran untuk menggandakan. Itu saja menggunakan dana anggaran rutin bidang tendik. Biasanya guru segera

memperbanyak sendiri." (Wawancara tanggal 12 Juni 2008)

Selanjutnya, hal lain yang harus ada dalam sumber daya adalah kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang, Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mampu menjalankan wewenang secara efektif. Ketepatan dan efektifitas pelimpahan wewenang pelaksana sudah baik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan beberapa peserta FGD,

"Di luar Kecamatan Ungaran, pelaksanaan dibantu oleh UPTD Kecamatan, namun tetap bisa berjalan." (FGD tanggal 14 Juni 2008). Menurut Edward dalam Budi Winarno (2002:136) para pejabat dari yurisdiksi tingkat tinggi dalam menangani implementasi biasanya meminta bantuan pejabat-pejabat yurisdiksi tingkat rendah. Hal ini terjadi pada implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang. Pihak dinas melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan dan para kepala sekolah untuk membantu dalam pelaksanaan

sertifikasi dan seleksi peserta sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang. Selain itu, para kepala sekolah, khususnya yang telah lulus uji sertifikasi diminta memfasilitasi guru dalam mengisi dan melengkapi berkas sertifikasi. Banyak hal dalam sertifikasi yang membutuhkan peran aktif kepala sekolah.

Komponen keempat dalam sumberdaya adalah fasilitas. Menurut Edwards dalam Budi Winarno (2002: 137), fasilitas fisik merupakan sumber penting dalam implementasi. Komponen fasilitas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang termasuk tidak memadai. Fasilitas berupa sarana dan prasarana maupun anggaran khusus untuk pelaksanaan sertifikasi di Kabupaten Semarang tidak ada, seperti diakui oleh Kasi Mutendik, Drs. Acyadi Yusri,

”Dana kami minim karena dari pusat memang tidak mengalokasikan dana pelaksanaan di tingkat kabupaten, ya tentu saja, pendukungnya adalah para peserta sendiri. Mereka mau iuran untuk pelaksanaan sertifikasi ini. Sedangkan faktor penghambatnya ya terus terang dana tadi. Kita mau nambah

sarana, tidak ada uang untuk beli, mau bayar insentif juga tidak ada dana.” (Wawancara tanggal 12 Juni 2008)

3. Disposisi Implementor

Disposisi implementor atau kecenderungan pelaksana merupakan faktor ketiga dalam implementasi kebijakan yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Menurut Edwards dalam Budi Winarno (2002: 143), terkait disposisi implementor, ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

Secara umum kecenderungan implementor adalah baik sehingga mereka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Para pelaksana kebijakan sertifikasi ini memiliki sikap atau perspektif yang mendukung kebijakan sehingga proses implementasi kebijakan berjalan efektif, sebagaimana diungkapkan oleh Kasi Mutendik, Drs. Acyadi Yusri,

"Kalau sikap pelaksana saya rasa, cukup baik. Meski tanpa mendapat insentif mereka kerja sampai lembur untuk mengurus berkas portofolio para guru. Dalam menghadapi segala persoalan dalam pemberkasan, mereka juga saya nilai sabar meskipun capek luar biasa. Permasalahannya itu macem-macam lo, apalagi ini kan yang diurus adalah guru-guru yang nuwun sewu, sudah senior atau sepuh. Jadi ya, kudu ekstra sabar." (Wawancara tanggal 12 Juni 2008).

Yang menarik adalah pengakuan para guru SD yang telah mengikuti sertifikasi. Mereka mengakui bahwa meskipun bekerja tanpa insentif, para pelaksana tidak melakukan pemungutan dana tidak resmi kepada para guru. Hal ini ditegaskan dari pernyataan salah seorang guru peserta FGD,

"Tidak ada. Jelas untuk pemberian amplop tidak ada. Itu rawan sekali." Pernyataan tersebut diperkuat oleh pengakuan peserta yang lain, "Untuk Kabupaten Semarang tidak ada yang berani melakukan pemungutan dana kami berani menjamin." (FGD tanggal 14 Juni 2008)

4. Struktur Birokrasi

Edwards menjelaskan salah satu aspek-aspek struktural paling mendasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standart Operating Procedures/ SOP*). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga menyeregalkan tindakan-tindakan dari pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas (Budi Winarno, 2002: 151). Dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi organisasi yang mengimplementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau *SOP*) yang menjadi pedoman bagi implementor di dalam bertindak.

Efektifitas struktur organisasi pelaksana sertifikasi Kabupaten Semarang termasuk baik. Struktur organisasi yang sederhana menyebabkan aktivitas implementasi menjadi fleksibel. Efektifitas ini ditandai dengan adanya hubungan hierarki dan pembagian tanggung

jawab yang tegas di antara personel.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Pengembangan Pendidik dan Profesi Universitas Negeri Semarang/Ketua Pelaksana Sertifikasi Rayon 12, Drs. Sugiyo, M.Si,

”Menurut saya memang mestinya keterlibatan kepala dinas, kasi dan kabit ketenagaan. Yang paling penting, merekalah yang paling tahu nasib guru-guru di daerah dan kondisi di daerah. Saya kira pelaksanaannya sudah sesuai berjalan efektif.” (Wawancara tanggal 28 Juni 2008)

Koordinasi internal yaitu dalam kepanitiaan sertifikasi Kabupaten Semarang berjalan baik. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Acyadi Yusri,

”Koordinasi ke dalam atau antar panitia sertifikasi Kabupaten Semarang berjalan baik. Bapak Kepala Dinas, juga sering memberikan arahan yang bermanfaat bagi pelaksanaan sertifikasi ini”. (Wawancara tanggal 12 Juni 2008)

5. Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Menurut Van Meter dan Horn, lingkungan sosial ekonomi mencakup sumber daya eko-

nomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan (Subarsono, 2005 : 101).

Kondisi sosial di masyarakat yang menempatkan guru sebagai panutan mendukung pelaksanaan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang. Sambutan dari masyarakat terhadap program sertifikasi guru SD ini juga baik. Hal ini dibenarkan oleh para guru peserta sertifikasi,

”Kalau ada guru yang sudah bersertifikasi sering dikasih selamat dari tetangga, wah besok syukuran nih.” (FGD tanggal 14 Juni 2008)

Lahirnya Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan harapan baru para guru dan dosen. Dengan undang-undang tersebut maka pemerintah sudah menunjukkan niat baik untuk mengangkat harkat dan martabat guru pada tempat yang lebih terhormat. Memberikan tunjangan profesi sebagaimana mengacu

pada undang-undang tersebut maka itu merupakan *reward* yang setimpal kepada guru. Di samping adil karena memberikan penghargaan kepada yang pantas menerimanya maka *reward* sebesar satu kali gaji pokok akan mendorong meningkatnya mutu pendidikan nasional. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidik dan Profesi Universitas Negeri Semarang/ Ketua Pelaksana Sertifikasi Rayon 12, Drs. Sugiyo, M.Si menjelaskan,

“Harapan ke depan dengan berhasilnya program sertifikasi guru maka kualitas pendidikan semakin naik, kinerja guru semakin bagus. Dengan tunjangan itu diharapkan guru menjadi lebih baik karena kita tahu banyak guru yang *nyambi* tukang ojek. Bagi saya pribadi, sebutan guru profesional itu benar-benar profesional. Guru itu singkatan dari dia punya Gagasan yang baik, kemudian banyak Usaha dalam pembelajarannya, memiliki Rasa kasih sayang dan yang terakhir Utama perilakunya. Kalau guru bisa mewujudkan semua itu maka guru akan benar-benar profesional.” (Wawancara tanggal 28 Juni 2008).

Dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini para guru dan pelaksana berharap semoga janji pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru terutama guru SD segera dapat terealisasi. Hal ini terungkap dalam pernyataan Kasi Mutendik Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Drs. Achmadi Yusri.

“Kalau kondisi sekarang ini memang semua serba sulit, apalagi untuk para guru SD. Dengan gaji yang pas-pasan, mereka dituntut untuk memberikan profesionalisme yang maksimal. Terkadang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka *nyambi* dagang, tani bahkan ada yang jadi tukang ojek. Kalau program sertifikasi ini bisa berjalan baik dan tunjangan sebesar gaji pokok bisa diterimakan kepada para guru tersebut, maka akan sangat memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Kan, bisa bermanfaat banyak seperti untuk biaya sekolah, biasanya, kan pakai *nyekolahke* SK. Namun, yang menjadi kekhawatiran saya adalah apabila kondisi ekonomi negara tidak segera membaik seperti ini, pemerintah nanti mau mbayar pake apa. Sebagian guru sampai pada *gojek*, nanti sertifikasi ini mau dibayar pakai

nominal *yen, yen ono, yen ora yo wis.*” (Wawancara tanggal 12 Juni 2008)

C. PENUTUP

1. Simpulan

a. Komunikasi

Faktor pertama yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang adalah komunikasi. Faktor ini meliputi transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Informasi tentang pelaksanaan sertifikasi guru SD telah dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Dalam pelaksanaannya selama tiga kali periode, para pelaksana sudah mampu menyampaikan informasi dengan baik. Konsistensi dalam komunikasi sertifikasi guru SD juga baik. Kejelasan merupakan aspek yang menjadi permasalahan dalam komunikasi informasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang. Ketidakjelasan informasi ini antara lain mengenai persyaratan masa kerja guru, format portofolio dan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

b. Sumber daya

Faktor sumber daya sebagai salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang. Faktor ini meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Komponen yang pertama adalah staf. Meskipun dari segi jumlah pelaksana sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang tidak terlalu banyak namun dengan bekal kemampuan yang dimiliki maka mereka mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Informasi dalam hal implementasi kebijakan sertifikasi guru SD ini memadai namun bagi guru yang ingin memiliki buku tersebut harus menggandakan sendiri. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang, Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mampu menjalankan wewenang secara efektif. Terakhir komponen fasilitas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang termasuk tidak memadai. Fasilitas berupa sarana dan prasarana maupun anggaran khusus untuk pelaksanaan

sertifikasi di Kabupaten Semarang tidak ada.

c. Disposisi Implementor

Secara umum kecenderungan pelaksana dalam implementasi kebijakan guru SD di Kabupaten Semarang adalah baik. Para pelaksana kebijakan sertifikasi ini memiliki sikap atau perspektif yang mendukung kebijakan sehingga proses implementasi kebijakan berjalan efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang termasuk baik. SOP yang digunakan mengacu pada buku pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional yaitu Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio.

e. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi mendukung pelaksanaan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang. Kesadaran para guru SD di Kabupaten Semarang bahwa kalau sudah tersertifikasi maka diakui profesionalismenya serta mendapatkan tunjangan profesi menjadi faktor pen-

dukung implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang.

2. Saran

a. Komunikasi

- 1) Perlu sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, para kepala sekolah SD serta pengawas guru SD dalam pemberian informasi kepada guru SD di Kabupaten Semarang.
- 2) Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mengoptimalkan pemanfaatan database seluruh guru SD baik negeri maupun swasta di Kabupaten Semarang yang akan mengikuti sertifikasi sampai tahun 2015.
- 3) Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang harus membantu guru dalam penyusunan dokumen portofolio sehingga memperlancar dalam proses sertifikasi dengan mengefektifkan tim supervisi dan verifikasi.
- 4) Para pelaksana mengikuti pendidikan atau pelatihan yang berhubungan dengan proses implementasi kebijakan sertifikasi.

- 5) Para guru lebih proaktif menanyakan secara langsung kepada pihak berkompeten mengenai syarat administrasi dan syarat akademik.
- b. Sumber daya
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang agar lebih memperhatikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang.
- c. Disposisi Implementor
Perlunya pemberian insentif bagi para pelaksana sebagai *reward* atas komitmen mereka dalam menyelesaikan tugas dengan baik.
- d. Struktur Birokrasi
 - 1) Adanya komitmen dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak terutama dari Pemerintah Daerah karena agar tujuan ideal yang akan diwujudkan dapat tercapai.
 - 2) Tim supervisi dan verifikasi data yang merupakan staf tenaga pendidik harus terus ditingkatkan kinerjanya sehingga data guru yang masuk bisa memenuhi kuota yang ditetapkan.
- e. Lingkungan sosial ekonomi

- 1) Pemerintah agar segera membayar tunjangan profesi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik.
- 2) Pembinaan guru SD harus berlangsung secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Badjuri, Abdulkahar. & T.Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi penelitian Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara. Bandung : Pustaka Setia.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik II*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik*

Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Ekosusilo, Madyo. 2003. *Supervisi Pengajaran dalam Latar Belakang Budaya Jawa : Studi Kasus Pembinaan Guru SD di Kraton Surakarta*. Surakarta : Universitas Bentara Press.

Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif*. Malang : YA3.

Howlett, Michael. & M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy : Policy Cycle and Policy Subsystem*. Canada : Oxford University Press.

Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Keban, Yermias, T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gava media.
Kismartini, dkk. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Buku Materi Pokok UT)*. Jakarta : Penerbit UT, Depdiknas.

Lincoln, Yvona S. & Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills : Sage Publication.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mulyasa. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Munandir, (trans), Robert C Bogdan. & Knop Biklen. 1992. *Riset Kualitatif Untuk Pendidikan. Pengantar Teori dan Metode*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Muslih, Masnur. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalitas Pendidik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Nawawi, Hadari. & Martina. 1994. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Naihasy, Syahrin. 2006. *Kebijakan Publik, Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta : PT Mida Pustaka.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

Rohedi, Tjetjep, (trans), Matthew B Miles. & AM Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode Baru*. Jakarta : UI Press.

Singarimbun, Masri. & Sofian Effendi. 1989. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiharto. 2008. Manajemen Keikhlasan Abaikan Administrasi. *Suara Merdeka*, 26 Februari 2008.

Supratno, Haris. 2007. *Workshop Strategi Meningkatkan Mutu Guru, Bogor, Tanggal 8 Desember 2007*

Sonhaji, K.H. 1994. *Misi, Strategi dan Kendala Penelitian Kualitatif*.

Malang : Pusat Penelitian IKIP Malang.

Trianto. & Titik Triwulan. 2007. *Sertifikasi dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.